BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan keseimbangan dalam aspek sosial, biologis, dan psikologis. Melalui perkawinan, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara alami, termasuk dalam menyalurkan hasrat seksual dengan pasangan secara sah. Selain itu, dari segi mental dan spiritual, pernikahan membantu individu lebih mampu mengendalikan emosi serta mengelola dorongan seksual dengan lebih baik.¹

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang berbahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

¹ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), h. 31.

² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Tim Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 7.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Kemudian dalam surah Yasin ayat 36 dinyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّ لَا يَعْلَمُونَ

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hal ini pun disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً

³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: Tim Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 7.

Islam juga menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad Saw riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس)

Perkawinan merupakan institusi yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat, dengan implikasi hukum, sosial, dan agama yang sangat mendalam. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan pencatatan resmi sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan secara siri, yakni perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena nikah siri ini menimbulkan beragam permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak-hak pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar. Dian Marlina, dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dilaksanakan pada Rabu, 24 April tahun 2024, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Kantor Pengadilan Agama

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), h. 8-11.

Martapura hingga akhir tahun 2023, angka perkawinan anak usia dini di Kabupaten Banjar masih tergolong tinggi. Kecamatan Martapura, Astambul, dan Pengaron tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi kasus pernikahan usia dini.⁵

Fenomena nikah siri di Kabupaten Banjar masih menunjukkan angka yang cukup tinggi disertai kompleksitas permasalahan yang mengiringinya. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya nikah siri adalah tingginya angka pernikahan usia dini. Banyak pernikahan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum, seperti pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama, sehingga tidak dapat dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Akibatnya, pasangan memilih menikah secara siri karena dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Selain alasan ekonomi dan tradisi adat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan juga menjadi faktor pendukung maraknya praktik nikah siri, khususnya di kalangan usia dini.

Praktik pernikahan siri di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini tercermin dari data perkara isbat nikah yang tercatat di Pengadilan Agama Martapura. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Martapura, jumlah perkara isbat nikah yang diajukan sejak bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2025 mencapai 187

⁵ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/24/dua-kecamatan-di-kabupaten-banjar-ini-tertinggi-pernikahan-dini-putus-sekolah-salah-satu-pemicunya>, di akses tanggal 11 April 2025.

perkara.⁶ Jumlah tersebut mengalami peningkatan secara berkala setiap bulan dan tersebar di hampir seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjar.

Peningkatan kasus pernikahan siri, khususnya di wilayah Kabupaten Banjar, menunjukkan bahwa praktik pernikahan di luar mekanisme pencatatan negara masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pemahaman hukum yang terbatas. Kendati demikian, praktik pernikahan siri menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan. Ketidakterjaminannya status hukum perempuan dalam pernikahan siri berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Ketiadaan pencatatan resmi menyebabkan pasangan yang menikah siri tidak memiliki dokumen hukum yang sah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, seperti warisan, nafkah, dan pengakuan hukum terhadap anak-anak mereka. Selain itu, dalam beberapa kasus, nikah siri juga berpotensi menimbulkan konflik hukum, terutama ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga atau ketika salah satu pihak ingin mengajukan gugatan cerai. Perceraian dalam pernikahan siri sering kali merugikan pihak istri karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya. Anak-anak hasil pernikahan siri juga sering

⁶ Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Martapura, di akses pada tanggal 31 Mei 2025.

menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran yang sah dengan identitas ayah yang jelas.⁷

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi pernikahan, KUA memiliki peran strategis dalam menangani kasus nikah siri. Namun, belum terdapat kebijakan yang secara tegas mengatur mekanisme penyelesaiannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penanganan di berbagai daerah. Fenomena nikah siri sering kali juga dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang lebih luas, salah satunya adalah meningkatnya angka pernikahan dini yang dilakukan secara siri tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak perempuan dan anak-anak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, nikah siri digunakan untuk menghindari ketentuan hukum terkait poligami yang tidak mendapatkan izin dari istri pertama, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.

Dari perspektif hukum Islam, nikah siri merupakan pernikahan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun, dalam konteks negara yang memiliki sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan menjadi elemen penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani fenomena nikah siri

⁷ Ines Aulia Dina, “Pengaruh Budaya dan Tradisi Terhadap Nikah Siri di Indonesia”, *Landraad: Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis* Vol. 4 No.1 Maret (2025), h. 91.

agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menetapkan bahwa setiap perkawinan harus tercatat secara resmi, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, meskipun pelaku nikah siri mungkin memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama, pada kenyataannya mereka mengabaikan kewajiban hukum negara. Padahal, dalam ajaran Islam, ketaatan terhadap hukum negara merupakan bagian dari ketaatan kepada *ulil amri*, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Eksistensi perkawinan siri akan menjadi lemah di kemudian hari karena tidak didukung oleh bukti otentik dan dokumentasi resmi, yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum.

Kondisi ini membawa dampak negatif yang serius, terutama bagi pihak perempuan, yang kerap menjadi pihak yang paling dirugikan. Tanpa dokumen hukum yang sah, perempuan tidak mendapatkan perlindungan maksimal, khususnya ketika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau ketika suami meninggalkan istri. Dalam situasi tersebut, lembaga peradilan tidak dapat memberikan pembelaan secara optimal karena tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan.⁹ Selain itu, anak yang lahir dari

⁸ Halil Khusairi, “Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.21 No.1 Juni (2022), h. 178.

⁹ Muhammad Budiono, “Dampak Sosial Nikah Siri”, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.4 No.1, Juni (2014), h. 216.

perkawinan siri juga menghadapi hambatan administratif, seperti kesulitan dalam mengurus akta kelahiran atau pencatatan identitas ayah. Bahkan, sifat rahasia dari perkawinan siri ini dapat menimbulkan fitnah dan ketidakjelasan status sosial dalam masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan administratif melalui pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang. Pencatatan ini tidak semata merupakan prosedur administratif, melainkan bagian integral dari peran negara dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, dan terciptanya ketertiban sosial. Perkawinan yang hanya didasarkan pada syarat dan rukun fikih klasik tanpa pencatatan resmi, meskipun sah secara syariat secara tekstual, pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum yang menjadi inti dari *maqâsid al-syari'ah*. Dalam konteks ini, memahami hukum Islam tidak cukup dilakukan secara normatif-tekstual, melainkan harus mempertimbangkan realitas sosial dan kemaslahatan yang lebih luas.

Menegakkan syariat tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap pencatatan administratif, sebab pencatatan itu sendiri merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kemudahan hidup yang menjadi prinsip dasar syariat Islam. Tanpa adanya pencatatan resmi, akan muncul berbagai kesulitan, khususnya dalam pembuktian status hukum pasangan suami istri serta pengurusan dokumen legal anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dampak ini dapat

bersifat jangka panjang, mencakup hambatan dalam akses pendidikan, hak waris, pengakuan identitas hukum, hingga perlindungan sosial semuanya merupakan hak-hak yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas, tetapi justru merupakan wujud konkret perlindungan hukum bagi individu dalam sistem negara hukum. Pencatatan juga menjamin kepastian dan keabsahan hubungan suami istri serta anak-anak mereka, sekaligus mendukung terwujudnya *maqâsid al-syarî'ah* seperti menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan melindungi kehormatan (*hifzh al-ird*). Oleh karena itu, pencatatan bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, tetapi merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan realitas maraknya praktik nikah siri di Kabupaten Banjar serta berbagai implikasi sosial dan hukum yang menyertainya, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana perspektif kepala Kantor Urusan Agama dalam menangani fenomena ini. Perspektif kepala Kantor Urusan Agama penting untuk ditelaah karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pencatatan perkawinan di tingkat kecamatan sekaligus pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan pernikahan. Melalui pandangan mereka, dapat tergambar secara jelas mekanisme penyelesaian hukum nikah siri yang selama ini diterapkan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dianggap tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya menyelaraskan penyelesaian hukum nikah siri dengan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan, serta prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan negara hukum Indonesia. Dengan menelaah perspektif kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang realitas penanganan nikah siri di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta merumuskan masukan yang relevan bagi penguatan kebijakan di bidang pencatatan perkawinan. Dengan latar belakang tersebut, penulis memandang penting untuk mengangkat permasalahan ini dalam tesis yang berjudul *“Perspektif Kepala KUA Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri Menyelaraskan Nilai Syariah dan Kepastian Hukum”*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata terhadap upaya menemukan solusi yang efektif, aplikatif, dan kontekstual yang tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum negara tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar mengenai penyelesaian hukum nikah siri dalam menyelaraskan nilai syariah dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar.
2. Untuk menganalisis perspektif kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai penyelesaian hukum nikah siri dalam menyelaraskan nilai syariah dan kepastian hukum.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penyelesaian hukum nikah siri di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik mengenai penerapan teori *maqâsid al-syarî'ah* dan teori kepastian hukum dalam konteks penyelesaian perkawinan yang tidak tercatat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis untuk menyelesaikan kasus nikah siri di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai syariah. Temuan

penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Agama, untuk memperkuat regulasi dan langkah preventif dalam penanganan nikah siri di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menjelaskan kata-kata kunci atau variabel penelitian yang akan dipergunakan dan dibahas oleh peneliti dalam proses penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini mengangkat judul ***“PERSPEKTIF KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELESAIAN HUKUM NIKAH SIRI MENYELARASKAN NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM”*** yang mana di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam judul tesis ini, maka penulis perlu mempertegas pengertiannya, yaitu:

1. Perspektif adalah merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, perspektif diartikan sebagai sudut pandang, penilaian dan cara pandang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banjar terhadap praktik penyelesaian hukum nikah siri.
2. Kepala KUA adalah pejabat fungsional penghulu yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Kantor Urusana Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016

¹⁰ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Karya Ilmiah Makalah, Artikel Jurnal, Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), h. 29.

¹¹ <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Dalam penelitian ini, yaitu Kepala KUA Astambul, KUA Gambut, KUA Karang Intan, KUA Martapura, KUA Mataraman, dan KUA Simpang Empat.

3. Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.¹² Dalam penelitian ini, KUA merupakan lembaga resmi yang berwenang melakukan pencatatan nikah di wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Nilai syariah yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pernikahan, termasuk tujuan pernikahan, *maqâsid al-syarî'ah*, serta kaidah fikih yang berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
5. Kepastian hukum berarti adanya aturan umum yang memberi tahu individu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus memberikan perlindungan dari kesewenangan pemerintah.¹³ Dalam penelitian ini, kepastian hukum merujuk pada jaminan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, khususnya terkait pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi terkait.

¹² Kementerian Agama RI, *Ensiklopedia Pernikahan*, h. 102.

¹³ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 225.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai referensi, peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Ilan Ahmad Zaeni Dahlan, "*Peran KUA Dalam Menangani Nikah Siri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kab.Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)*". Dalam tesis ini membahas bahwa beberapa faktor penyebabnya termasuk menghindari perzinahan, kehamilan di luar nikah, perselingkuhan (poligami tanpa alasan). Namun, faktor yang paling mendasar dalam terjadinya pernikahan siri pada usia dini adalah alasan usia dan kurangnya kesadaran hukum. Salah satu upaya KUA dalam mencegah pernikahan siri usia dini adalah melalui optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi, pendampingan berkelanjutan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan yang tidak tercatat, dilakukan secara persuasif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan siri dan pernikahan usia dini di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon adalah tradisi dan budaya, pendidikan dan media sosial.¹⁴

¹⁴ Ilan Ahmad Zaeni Dahlan, "*Peran KUA Dalam Menangani Nikah Siri Usia Dini Di Kecamatan Gegesik Kab.Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan)*", Tesis: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Penelitian yang ditulis oleh Rahmatullah berjudul “*Analisis Yuridis Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga*”. Kesimpulan dalam penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah secara siri dengan mencantumkan frasa “nikah belum dicatat” berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Dampak yang muncul adalah tidak terpenuhinya kepastian hukum terhadap status perkawinan pasangan tersebut, sekaligus dapat mendorong maraknya praktik nikah siri di Indonesia. Ketentuan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 berimplikasi pada terjadinya ketidakjelasan hukum karena berpotensi bertentangan dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan aturan, terutama karena berkaitan langsung dengan peran KUA dan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan pelaksanaan isbat nikah.¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syahrul berjudul “*Fenomena Pernikahan Siri di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang)*”. Dalam tesis ini membahas mengenai fenomena nikah siri di Kabupaten Kampar studi kasus Kecamatan Kampar dan Kecamatan Tambang. Masalah perkawinan siri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama. Fenomena nikah siri yang terjadi di karenakan beberapa faktor diantaranya, faktor

¹⁵ Rahmatullah, “*Analisis Yuridis Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga*”, Tesis: UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

ekonomi, faktor administrasi dan faktor hamil diluar nikah. Dalam pandangan sosiologis hukum Islam ada beberapa aspek yang harus diperhatikan menyingkapi masalah ini diantaranya kurangnya perhatian masyarakat terhadap akibat nikah siri yang dilaksanakan, nikah siri dalam hukum islam adalah sah, namun secara normatif hukum tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadinya perceraian. Pernikahan siri juga dianggap merugikan perempuan dan anak, selain istri tidak mendapatkan haknya atas harta gono gini, juga anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Meiriza Utami Nur berjudul “*Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat dan Para Ulama*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan Tokoh Adat Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, praktik nikah siri tidak dianjurkan jika ditinjau dari hukum adat istiadat Suku Rejang. Namun, realitas di masyarakat Kota Curup menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih marak dilakukan karena dianggap tidak memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan meskipun tidak dicatatkan secara resmi. Sementara itu, menurut hukum perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Pencatatan ini memberikan kepastian dan kekuatan hukum.

¹⁶ Muhammad Syahrul, “*Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kampar Dan Kecamatan Tambang)*”, Tesis: UIN Suska Riau, 2023.

Kedudukan istri dalam hukum Islam sama dengan pernikahan yang dicatatkan, namun dalam pandangan negara, pernikahan tanpa pencatatan tidak diakui secara hukum. Demikian pula, dalam hukum Islam, kedudukan anak yang lahir dari nikah siri setara dengan anak dari pernikahan yang dicatatkan. Akan tetapi, menurut hukum negara, ketiadaan akta nikah orang tua mengakibatkan akta kelahiran anak tidak dapat mencantumkan nama ayah biologis, melainkan hanya nama ibu yang melahirkannya.¹⁷

Penelitian yang ditulis oleh Bunyamin berjudul “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung)*”. Kesimpulan dari penelitian tesis ini bahwa Faktor-faktor penyebab masih terjadinya pernikahan siri di Kota Bandar Lampung adalah: faktor budaya, faktor ekonomi atau gaya hidup, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas, faktor hamil duluan, faktor sulitnya berpoligami, ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan sanksi terhadap pelaku nikah siri sehingga masih terjadi praktek pernikahan siri. Adapun peran yang dilakukan oleh KUA adalah dengan melaksanakan sosialisasi, edukasi serta bimbingan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi calon pasangan pengantin pada khususnya. Upaya yang dilakukan oleh KUA adalah dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi, aplikasi kepada masyarakat melalui: penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia di KUA Kepada calon pengantin dan wali,

¹⁷ Meiriza Utami Nur, “*Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat dan Para Ulama*”, Tesis: IAIN Curup, 2022.

pengadaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin oleh kepala KUA atau juga oleh Penghulu, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak buruknya terhadap keluarganya melalui pengajian-pengajian di masjid, melakukan himbauan melalui media baik cetak maupun elektronik, memberikan penyuluhan melalui para Penyuluh ke setiap Kelurahan terkait dengan pencatatan pernikahan dan juga mengenai Keluarga Sakinah.¹⁸

Penelitian yang ditulis oleh M. Jusri berjudul “*Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Praktik nikah siri masih banyak terjadi di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: ekonomi, tidak mendapatkan restu dari orang tua, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, tidak adanya sanksi bagi pelaku nikah siri, serta kendala izin poligami, 2. Praktik nikah siri di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur secara umum sama dengan praktik nikah siri di tempat lain, yaitu mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa dilakukan pencatatan terlebih dahulu. Praktik nikah ini sah menurut agama namun tidak menurut hukum positif. Namun, apabila sebuah kemaslahatan keluarga menjadi sebuah tujuan hukum keluarga Islam maka

¹⁸ Bunyamin, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung)*”, Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

ada pintu masuk untuk mempertemukan keduanya melalui paradigma masalah yang menyandarkan hukum kepada teks-teks nash, terutama dalam masalah yang mu'tabarah, 3. Upaya pencegahan terhadap praktik nikah siri dapat dilakukan melalui penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembaruan hukum keluarga Islam terkait pencatatan nikah, peningkatan pelayanan KUA, kemudahan dalam pemberian izin poligami, serta menjalin kerja sama yang aktif dengan masyarakat.¹⁹

Adapun dalam penelitian tesis ini terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab nikah siri, seperti alasan ekonomi, budaya, usia dini, administrasi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, hukum, dan psikologis pasangan maupun anak-anak. Penelitian ini justru menitikberatkan pada perspektif kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar dalam memandang mekanisme penyelesaian nikah siri dan upaya menyelaraskannya dengan nilai-nilai syariah dan prinsip kepastian hukum.

Sedangkan kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perspektif kepala KUA sebagai pelaksana langsung kebijakan di lapangan, yang dianalisis dengan teori *maqâsid al-syarî'ah* dan teori kepastian hukum, sehingga menghasilkan sudut pandang baru serta rekomendasi strategis yang kontekstual dan aplikatif untuk memperkuat penyelesaian hukum nikah siri.

¹⁹ M. Jusri, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)", Tesis: IAIN Palopo, 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis Tentang Pernikahan Siri, yaitu membahas tinjauan umum tentang pernikahan, tinjauan umum tentang nikah siri, teori-teori yang digunakan yaitu teori maqashid syariah dan teori kepastian hukum serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian diantaranya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV Analisis Perspektif Kepala KUA Kabupaten Banjar Tentang Penyelesaian Hukum Nikah Siri, menyajikan data mengenai mekanisme penyelesaian hukum terhadap kasus nikah siri di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar serta perspektif kepala Kantor Urusan Agama mengenai penyelesaian hukum nikah siri dalam menyelaraskan nilai syariah dan kepastian hukum, yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan kebijakan maupun penelitian selanjutnya.